Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

# MEA dan Pekerja Perempuan

Menjelang akhir 2015, Jakarta tampak bergegas menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). "ASEAN adalah Kita", demikian slogannya. Untuk kepentingan itu, berbagai proyek infrastruktur pun disiapkan. Kini, oleh pihak-pihak yang berkepentingan, Jakarta sedang disulap menjadi hutan puluhan lantai untuk berbagai kegiatan komersil. Entah siapa yang dimaksud dengan "Kita" dalam slogan tersebut, dan apa pula hubungan "ekonomi bersama" ASEAN itu dengan "Kita" yang dituju dalam slogan.

Fakta yang kerap terjadi adalah justru hampir setiap malam di atas pukul 7 jutaan pekerja bergelombang pulang menumpang angkutan-angkutan umum dengan wajah lelah dan tak ramah. Mayoritas dari mereka adalah perempuan. Rata-rata mereka bekerja di sektor manufaktur, perdagangan, dan finansial. Tak banyak di antara mereka yang bergaji bersih lebih dari 5 juta rupiah. Bahkan, realitas itu pun masih dibarengi dengan keadaan yang mengharuskan mereka untuk telah mempersiapkan diri sejak subuh untuk melaju ke tempat kerja dan kembali ke rumah paling cepat pada pukul 21.00.

Bagi para pekerja perempuan itu, aktivitas kerja sejak subuh menjelang malam pun masih harus dibarengi setidaknya 2-3 jam untuk mengurusi pekerjaan-pekerjaan rumah tangga: memasak, mengurus anak, dan membersihkan rumah. Adalah kemujuran tersendiri bila pekerjaan-pekerjaan domestik itu mendapatkan bantuan dari suami. Lebih-lebih, mujur bagi mereka dengan pendapatan lebih besar lantaran dengan demikian mereka dapat mempekerjakan asisten rumah tangga. Dalam hal ini, para asisten rumah tangga itu pun mayoritas didominasi oleh pekerja perempuan.

## Kenyataan Saat Ini

Per Februari 2014, jumlah penduduk dengan usia produktif (angkatan kerja) di Indonesia adalah 125,3 juta jiwa, sementara jumlah pekerja per Februari 2014 sekitar 118,2 juta jiwa. Peningkatan partisipasi angkatan kerja didorong oleh meningkatnya keterlibatan pekerja perempuan perkotaan. Berdasarkan data International Labor Organisation (ILO) dalam Riset Kerja Layak 2006-2016, masih terjadi kesenjangan di dalam tingkat partisipasi tersebut, yakni 85% laki-laki dan 53,4% perempuan.

Upah rata-rata pekerja perempuan masih lebih rendah dibanding upah pekerja laki-laki. Dalam siaran pers pada 20 Mei 2015, Bappenas mengakui rerata upah pekerja perempuan jauh lebih rendah dari pekerja laki-laki, yaitu 1.427 juta rupiah untuk pekerja perempuan dan 1.795 juta rupiah untuk pekerja laki-laki pada 2013. Sekitar 30% pekerja perempuan berstatus tidak dibayar.[1] Para pekerja perempuan itu juga mendominasi sektor kerja informal yang berbasis kontrak. Maka, ketika keputusan penangguhan upah 2013 di DKI Jakarta diumumkan, para pekerja perempuan di sektor-

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

sektor seperti garmen, tekstil, alas kaki, serta mainan termasuk sebagai korban pertama lantaran mereka mendominasi sektor tersebut. Mereka juga lebih rentan di-PHK karena pola kerjanya dianggap lebih fleksibel dan mereka bukan termasuk pekerja utama. Pengabaian hak-hak reproduksi terhadap para pekerja perempuan di perkotaan itu juga masih menjadi isu utama, antara lain hak untuk mengambil cuti haid, cuti hamil, dan cuti keguguran yang layak.

Menurut Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kemenakertrans, Khairul Anwar, pekerja perempuan Indonesia berpotensi lebih besar mengisi pasar kerja ASEAN untuk sektor garmen dan tenaga medis. Hal ini terutama karena sebanyak 80% pekerja perempuan mendominasi sektor garmen saat ini.

Sementara itu, daya saing produk industri sektor manufaktur garmen dan tekstil di Indonesia justru semakin lemah.[2] Dalam sektor tekstil, peningkatan harga bahan bakar dan tarif dasar listrik sebagai imbas dari kebijakan penghapusan subsidi menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terbebani dengan mahalnya biaya produksi. Di sisi lain, daya beli masyarakat masih lemah. Hal ini diperparah lagi dengan serbuan produk tekstil dari Tiongkok sebagai hasil dari dibukanya keran impor. Konsekuensinya, pengusaha tekstil dalam negeri semakin berada di bawah tekanan.

Lantaran kondisi tersebut, para pengusaha menengah manufaktur garmen menerapkan ancaman relokasi ke wilayah lain, juga negara lain, dengan upah yang lebih rendah kepada para pekerjanya. Kamboja, Vietnam, dan Laos adalah sasaran utama mereka. Bayang-bayang PHK dan status kerja yang semakin fleksibel (baca: sistem kerja kontrak) di sektor ini adalah potret buram nasib perempuan pekerja ke depannya.

Kondisi kerja yang buruk, jam kerja yang panjang, serta berbagai hak normatif yang tak dipenuhi sesuai aturan perundangan adalah permasalahan yang paling banyak ditemukan di sektor ini. Sektor yang diunggulkan oleh Kemenakertrans ini tidak dibarengi dengan pemenuhan hak kepada para pekerja perempuan. Sektor ini biasanya hanya menampung pekerja perempuan dengan tingkat pendidikan dan kecakapan yang rendah. Hal tersebut sering menjadi alasan untuk menekan tingkat upah para pekerja perempuan itu.

Belum lagi, pada umumnya pekerjaan rumah tangga masih menjadi wilayah yang ditangani oleh para pekerja perempuan. Dari potret tersebut, para pekerja perempuan tampak lebih “menerima” pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak produktif karena sistem patriarkis masih mengakar kuat di masyarakat. Di sinilah posisi penting pekerja perempuan dalam rantai pasar kerja kapitalisme. Para pekerja perempuan dipandang memiliki nilai lebih karena mereka bersikap lebih fleksibel sehingga lebih mudah direpresi dengan penerapan peningkatan jam kerja ataupun perubahan sistem kerja yang dapat berlaku sewaktu-waktu.

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

**Janji di Hadapan**

Indonesia sejak Orde Baru menjadi pasar yang sangat menjanjikan: tenaga kerjanya yang murah, bahan baku (sumber daya alam) yang berlimpah, dan pasar yang besar (jumlah penduduk banyak). Tiga komponen "keuntungan komparatif" ini belum berubah. Ditambah meningkatnya jumlah 'kelas menengah' yang berpendapatan lumayan dan melonjaknya kekayaan orang-orang terkaya, pasar Indonesia sangat menjanjikan.

Perempuan pekerja Indonesia berada dalam situasi yang sama sekali tidak menguntungkan di dalam percaturan global liberalisasi tenaga kerja. Nasib perempuan pekerja migran di luar negeri adalah potret buram lepas tangannya negara dalam melindungi dan meningkatkan kemampuan pekerja perempuan Indonesia. Justru karena tidak mendapatkan kesempatan dan kepastian kerja di dalam negerilah para perempuan, yang mayoritas berusia muda tersebut, menjadi pekerja migran.

Tidak akan ada persaingan yang adil di tengah titik berangkat yang tidak adil. Masuknya pekerja-pekerja berketerampilan dari berbagai negara di ASEAN tentu akan menyingkirkan lebih banyak tenaga kerja perempuan Indonesia. Penyingkiran ini berpotensi menimbulkan konflik horizontal baru, sekaligus menambah potensi bagi tenaga kerja perempuan Indonesia untuk menjadi pekerja migran, yang bisa jadi menjerumuskannya pada lapangan pekerjaan tanpa jaminan perlindungan. Lalu, janji apa yang ditawarkan MEA di tengah situasi mendasar pekerja perempuan yang belum banyak berubah?

Secara umum, para pemangku jabatan dan pihak-pihak yang optimis terhadap MEA menganggapnya sebagai momentum untuk menata ulang kesepakatan liberalisasi yang sudah ada, kemudahan penjualan barang dan jasa karena makin kompetitif, kemudahan investasi asing untuk pembukaan lapangan kerja, liberalisasi pasar kerja berbasis kompetensi, serta peluang bagi Indonesia untuk menjadi sumber pemasok energi dan bahan baku industrialisasi.

Padahal, kekuatan modal dan politik dalam tata ekonomi global maupun regional tidak setara. Indonesia lebih bergantung pada modal asing sehingga membuat posisi tawar negara rendah. Liberalisasi ekonomi juga tidak bebas nilai, dalam praktiknya persaingan sempurna adalah utopia, modal besar akan menang dan kompetisi berlaku tidak berimbang. Dampak negatifnya, hal itu justru mendorong kehancuran sektor riil, khususnya manufaktur ringan, yang pada periode sebelumnya pun belum membaik. Liberalisasi pasar kerja juga akan melibas tenaga kerja dalam negeri yang taraf sumber daya dan perlindungannya masih rendah.

Pada poin terakhir inilah, nasib pekerja perempuan dalam negeri akan secara langsung dipertaruhkan lagi. Para pekerja perempuan memiliki sumber daya dan perlindungan paling rendah. Memang terdapat peningkatan jumlah perempuan yang duduk di

Koleksi
Pusat Dokumentasi ELSAM

pendidikan tinggi dibanding laki-laki. Namun, lapangan pekerjaan yang tersedia umumnya hanya mensyaratkan keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah.

Dus, apakah semua pekerja perempuan akan mengalami kerugian? Tentu tidak. Dalam persaingan di dunia kerja, para pekerja perempuan dengan keterampilan tinggi—yang sanggup membayar pendidikan atau mendapat fasilitas memadai—berpeluang lebih besar untuk bersaing dan mengubah nasibnya. Celakanya, mayoritas angkatan kerja perempuan Indonesia saat ini bukanlah perempuan-perempuan yang mendapat untung dari sistem kekuasaan hari ini.

Maka, siapakah "Kita" di dalam ASEAN?

*Zely Ariane, peminat studi Feminisme dan bekerja untuk PapuaItuKita

[1] Lihat Siaran Pers Bappenas 20 Mei 2015: http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/menteri-andrinof-indeks-pembangunan-gender-ipg-terus-meningkat/ (Diakses pada 7 September 2015)
2 Mantra, Dodi. *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme—Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.* Bekasi: MantraPress, Oktober 2012, hlm. 10.